

PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

H. Moh. Armoyu*

Abstract: *The problem of poverty has happened for long times and it seems to be more complicated and endless matter. Because of poverty, many children cannot proceed to study and even they should work to help parents earn for living. Therefore, it needs high effort and commitment to overcome this problem and it should be done deliberately and continuously. This study attempted to investigate the role of education in poverty alleviation in Indonesia. The data was collected by employing in-depth interviews and analyzed using phenomenological models. The results showed that: (1) the level of education could cut the chain of poverty; (2) in general, the results of this study found that there were a foster care program for children from economically-challenged families, educational empowerment that emphasizes children from economically-challenged families as a central point of empowerment in the development process, and providing opportunity for talented children from economically-challenged families to proceed higher study in reputable universities, (3) conducting research to select students who will be given a scholarship, based on academic experience and the background of parents.*

ملخص: قضية الفقر قضية قديمة العهد وكأن ليس لها النهاية. بسبب الفقر لا يدرس كثير من الأولاد في المدارس بل يساعدون آباءهم (يعملون) للحصول على المعاش. لذا لا بد من وجود العزم الجماعي المتواصل لحل هذه المشكلة. حاولت هذه الدراسة البحث في دور التربية في القضاء على قضية الفقر ليسهم في تقديم سبل الحل لقضية الفقر عن طريق التربية. أحرى هذا البحث في إندونيسيا وتجمع بياناتها عن طريق المقابلة العميقة، وأما أسلوب تحليله بالتحليل الفينومولوجي. دلت نتائج البحث على: (١) أن المستوى التربوي قاطع لسلسلة الفقر، (٢) وعمامة دلت الدراسة على أن هناك برنامج تحضين الأولاد المنقطعين عن الدراسة من الأسر الفقيرة والمحاولة لإدخالهم في المدارس أو الجامعات المتقدمة لتنمية قدراتهم الأكاديمية، (٣) القيام بتحليل دقيق تجاه الطلاب الذين سيحصلون على المنحة الدراسية حسب خبراهم الأكاديمية وخلفية آبائهم وأمهاتهم

Keywords: *Pemberdayaan, pengentasan kemiskinan, pendidikan Islam.*

* Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo

PENDAHULUAN

Agama Islam seharusnya mampu membawa keselamatan dan kesejahteraan, sesuai dengan makna yang terkandung di dalam Islam itu sendiri yaitu aman, selamat, dan sejahtera. Namun mengapa justru hal tersebut belum mampu terwujud di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim termasuk Indonesia. Apakah sistem perekonomian dalam Islam itu tidak sesuai diterapkan di negara kita, ataukah ada faktor lain yang menjadi penyebabnya. Bagaimana sesungguhnya pandangan Islam tentang kemiskinan dan solusi apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau menghapusnya. Kemiskinan adalah musibah yang harus dihapuskan dari masyarakat. Sebab konsekwensi kemiskinan adalah kekafiran yang dianggap sebagai sebuah kejahatan. Maka Islam dengan tegas melarang seorang muslim berpangku tangan, bermalas-malasan, menyia-nyiakan waktu, atau melakukan hal-hal yang tidak produktif.

Kemiskinan adalah sebuah topik yang dibicarakan hampir di seluruh dunia. kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Pembangunan di Indonesia saat ini telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek di masyarakat, baik pada kawasan pedesaan maupun perkotaan. Perubahan tersebut membawa dampak tidak hanya terhadap lingkungan fisik, tapi juga sistem nilai dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Namun sayangnya perubahan yang diciptakan oleh pembangunan membawa dampak yang menyertainya sangat mengerikan dan kompleks, karena ternyata telah melahirkan keterbelakangan dan kemiskinan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan: Paradigma Fungsional dan paradigma Sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern. Menurut pengalaman masyarakat di Barat, lembaga pendidikan formal sistem persekolahan merupakan lembaga utama mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan keahlian,

dan menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan.

Bukti-bukti menunjukkan adanya kaitan yang erat antara pendidikan formal seseorang dan partisipasinya dalam pembangunan. Perkembangan lebih lanjut muncul, tesis Human Investmen, yang menyatakan bahwa investasi dalam diri manusia lebih menguntungkan, memiliki *economic rate of return* yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam bidang fisik.

Sejalan dengan paradigma Fungsional, paradigma Sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah: a) mengembangkan kompetensi individu, b) kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, dan c) secara umum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat dan semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

Masalah kemiskinan sudah ada sejak zaman dahulu dan sepertinya tidak ada habisnya, karena kemiskinan banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati dan mengenyam bangku sekolah, dan karena kemiskinan pula banyak anak-anak di bawah umur yang bekerja untuk membantu orang tua.

Kemiskinan juga berdampak pada pendidikan. Di zaman sekarang untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas maka perlu di imbangi dengan biaya. Sehingga masyarakat yang berekonomi lemah tidak mampu untuk membayarnya. Akibatnya pendidikan dan pengetahuan yang mereka miliki di bawah standar. Bahkan banyak anak-anak yang tidak sekolah dan putus sekolah karena kemiskinan.

Berbagai macam cara yang telah di lakukan oleh pemerintah namun sepertinya belum berjalan sesuai dengan harapan. Program bantuan langsung tunai (BLT) salah satunya, yang di tujukan kepada masyarakat kurang mampu. Tetapi program BLT ini masih belum berjalan dengan lancar karena masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, misalnya adanya penerima yang seharusnya tidak berhak, dan yang berhak tetapi tidak menerima. Serta program sekolah gratis sampai jenjang SMP, tetapi kenyataanya tetap terjadi berbagai macam pungutan-pungutan.

Masalah kemiskinan ini harus segera diatasi dengan cepat dan tepat agar tidak semakin memperihatinkan. Makalah ini membahas tentang *penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan mutu pendidikan* sehingga setelah membaca

makalah ini di harapkan dapat mengambil sebuah pelajaran dan dapat mempraktikkannya secara langsung.

Tabel.1. Kategori Kelompok Kemiskinan

No	Kelompok	Indikator	Keterangan Pendapatan
1.	Kemiskinan Absolut	Mengacu pada satu set standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia	pendapatandibawah usd \$1/hari
2.	Kemiskinan Relatif	Diperengaruhi oleh waktu dan tempat/negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan di bawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan tubuh manusia	pendapatandibawah \$2 per hari

Sumber: World Bank 2012

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.

KONSEP KEMISKINAN

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Menurut Koerniatmanto Soetoprawiryo menyebut dalam Bahasa Latin ada istilah *esse (to be)* atau (martabat manusia) dan *habere*

(*to have*) atau (harta atau kepemilikan). Oleh sebagian besar orang persoalan kemiskinan lebih dipahami dalam konteks *habere*. Orang miskin adalah orang yang tidak menguasai dan memiliki sesuatu. Urusan kemiskinan urusan bersifat ekonomis semata.

Meski kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang setua peradaban manusia tetapi pemahaman terhadapnya dan upaya-upaya untuk mengentaskannya belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Para pengamat ekonomi pada awalnya melihat masalah kemiskinan sebagai “sesuatu” yang hanya selalu dikaitkan dengan faktor-faktor ekonomi saja. Hari Susanto [2006] mengatakan umumnya instrumen yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat tersebut miskin atau tidak bisa dipantau dengan memakai ukuran peningkatan pendapatan atau tingkat konsumsi seseorang atau sekelompok orang. Padahal hakikat kemiskinan dapat dilihat dari berbagai faktor. Apakah itu sosial-budaya, ekonomi, politik, maupun hukum.

Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan global. Di Indonesia masalah kemiskinan seperti tak kunjung usai. Masih banyak kita dapati para pengemis dan gelandangan berkeliaran tidak hanya di pedesaan bahkan di kota-kota besar seperti jakarta pun pemandangan seperti ini menjadi tontonan setiap hari. Kini di Indonesia jerat kemiskinan semakin parah. Kemiskinan bukan semata –mata persoalan ekonomi melainkan kemiskinan kultural dan struktural.

Lingkaran kemiskinan didefinisikan sebagai suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menimbulkan suatu kondisi dimana sebuah negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Konsep lingkaran kemiskinan menganggap bahwa: (1) Ketidakmampuan untuk mengerahkan tabungan yang cukup. (2) Kurangnya faktor pendorong untuk kegiatan penanaman modal. (3). Tingkat pendidikan masih rendah, merupakan tiga faktor utama yang menghambat proses pembentukan modal dan pembangunan ekonomi di berbagai negara yang sedang berkembang.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan global. Di indonesia masalah kemiskinan seperti tak kunjung usai. Masih banyak kita dapati para pengemis dan gelandangan berkeliaran tidak hanya di pedesaan bahkan di

kota-kota besar seperti Jakarta pun pemandangan seperti ini menjadi tontonan setiap hari. Kini di Indonesia jerat kemiskinan semakin parah. Kemiskinan bukan semata-mata persoalan ekonomi melainkan kemiskinan kultural dan struktural.

Pendidikan berfungsi sebagai *driving force* atau daya penggerak transformasi masyarakat untuk memutus rantai kemiskinan. Pendidikan membantu menurunkan kemiskinan melalui efeknya pada produktivitas tenaga kerja dan melalui jalur manfaat sosial, maka pendidikan merupakan sebuah tujuan pembangunan yang penting bagi bangsa.¹ Pendidikan sebagai sarana untuk memperoleh wawasan, ilmu pengetahuan dan keterampilan agar peluang kerja lebih terbuka dan upah yang didapat juga lebih tinggi.

Tabel 2. Hubungan Antar Pendidikan dan Ekonomi

No	Pendidikan	Ekonomi
1	<ul style="list-style-type: none"> – Pendidikan berfungsi sebagai <i>driving force</i> atau daya penggerak transformasi masyarakat untuk memutus rantai kemiskinan. – Pendidikan sebagai sarana untuk memperoleh wawasan, ilmu pengetahuan dan keterampilan 	Peluang kerja lebih terbuka dan upah yang didapat juga lebih tinggi.

Sumber: penelitian dari Rahman (2006)

Dari tabel 2 di atas dapat dijelaskan secara rinci adanya hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan upah/gaji yang diterima oleh pekerja. Sehingga tingkat pendidikan bisa memutus mata rantai kemiskinan.

Menurut teori pertumbuhan *endogen* yang dipelopori oleh Lucas dan Romer,² pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Pendidikan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif. Tenaga kerja yang mempunyai produktivitas tinggi akan menghasilkan *output* yang lebih banyak sehingga secara agregat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

¹ World Bank, 2005

² Lucas dan Romer, *Penyebab Kemiskinan di Indonesia*, 2010.

Seperti halnya hasil penelitian dari Andersson *et.al*³ yang berjudul *Determinants of Poverty in Lao PDR* menyatakan bahwa pendidikan seseorang sebagai salah satu determinan konsumsi per kapita. Sedangkan Suparno⁴ juga menemukan hasil penelitiannya bahwa rata-rata lama sekolah yang menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Masyarakat yang berpendidikan tinggi akan mempunyai keterampilan dan keahlian, sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan produktivitas akan meningkatkan *output* perusahaan, peningkatan upah pekerja, peningkatan daya beli masyarakat sehingga akan mengurangi kemiskinan.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

MASALAH SOSIAL TENTANG KEMISKINAN

Masalah kemiskinan sudah ada sejak zaman dahulu dan sepertinya tidak ada habisnya, karena kemiskinan banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati dan mengenyam bangku sekolah, dan karena kemiskinan pula banyak anak-anak di bawah umur yang bekerja untuk membantu orang tua. Kemiskinan juga berdampak pada pendidikan. Di zaman sekarang untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas maka perlu diimbangi dengan biaya. Sehingga masyarakat yang berekonomi lemah tidak mampu untuk membiayainya. Akibatnya pendidikan dan pengetahuan yang mereka miliki di bawah standar. Bahkan banyak anak-anak yang tidak sekolah dan putus sekolah karena kemiskinan.

Berbagai macam cara yang telah dilakukan oleh pemerintah namun sepertinya belum berjalan sesuai dengan harapan. Program bantuan langsung tunai (BLT) salah satunya, yang di tujukan kepada masyarakat kurang mampu. Tetapi program BLT ini masih belum berjalan dengan lancar karena masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, misalnya adanya penerima yang seharusnya tidak berhak, dan yang berhak tetapi tidak menerima. Serta program sekolah gratis sampai jenjang SMP, tetapi kenyataannya tetap terjadi berbagai macam pungutan-pungutan.

³ Andersson, Engvall and Kokko, *Determinants of Poverty in Lao PDR*. *Stockholm School of Asian Studies*, Stockholm School of Economics, 2005.

⁴ Suparno, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan: Studi Pro Por Growth Policy di Indonesia*, (Bogor: Bogor, 2010). 54.

Selain itu, masalah kemiskinan ini harus segera diatasi dengan cepat dan tepat agar tidak semakin memperihatinkan. Makalah ini membahas tentang *penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan mutu pendidikan* sehingga setelah membaca makalah ini di harapkan dapat mengambil sebuah pelajaran dan dapat mempraktikkannya secara langsung.

Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan global. Di Indonesia masalah kemiskinan seperti tidak kunjung selesai. Masih banyak didapati para pengemis dan gelandangan berkeliaran tidak hanya di pedesaan bahkan di kota-kota besar seperti jakarta pun pemandangan seperti ini menjadi tontonan setiap hari. Sekarang di Indonesia jerat kemiskinan semakin parah. Kemiskinan bukan semata mata persoalan ekonomi melainkan kemiskinan kultural dan struktural.

Dampak kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks, diantaranya, (1) Pengangguran, (2) Kekerasan,(3) Pendidikan, (4) Kesehatan, (5) Upaya pengetasan kemiskinan di Indonesia.

Seperti telah disinggung di atas bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks yang tak terpisahkan dari pembangunan mekanisme sosial, ekonomi dan politik yang berlaku. Oleh karena itu setiap upaya pengetasan kemiskinan secara tuntas menuntut peninjauan sampai keakar masalah, jadi, memang tak ada jalan pintas untuk mengetaskan masalah kemiskinan ini. Penanggulangnya tidak bisa secara tergesa-gesa.

Komitmen pemerintah untuk mengetaskan kemiskinan tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disusun berdasarkan strategi nasional penanggulangan kemiskinan(SNPK). Di samping turut menandatangani tujuan pembangunan milenium, dalam RPJM-nya pemerintah telah menyusun tujuan-tujuan pokok dalam mengetaskan kemiskinan. Termasuk target ambisius dalam mengurangi angka kemiskinan.

Ada tiga ciri kemiskinan yang menonjol di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada disekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan PPPAS\$1,55-per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tidak tergolong miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dapat dikatagorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.

Tiga cara untuk membantu mengangkat diri dari kemiskinan adalah melalui pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Masing-masing cara tersebut menangani minimal satu dari tiga ciri utama kemiskinan di Indonesia, yaitu: kerentanan, sifat multy dimensi dan keragaman antar daerah .

Dengan kata lain, strategi dari pengentasan yang efektif bagi Indonesia terdiri dari tiga komponen: (1) Membuat pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi rakyat miskin. (2) Membuat layanan sosial bermanfaat bagi rakyat miskin. (3) Membuat pengeluaran pemerintah bermanfaat bagi rakyat miskin.

Gurita kemiskinan benar-benar mencengkeran dan menghantui perjalanan bangsa Indonesia. Angka-angka statistik tentang keberhasilan pemerintah menurunkan angka kemiskinan itu hanya sebatas angka. Yang turun angka kemiskinannya, bukan kemiskinan itu sendiri sebagai realitas sosial yang mesti diselesaikan dengan baik.

Pada kenyataannya, kemiskinan masih menjadi realitas yang mudah ditemukan di mana-mana, bahkan di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, kemiskinan masih menjadi pemandangan umum yang menjadi pemandangan di berbagai tempat. Di balik megahnya bangunan pencakar langit, di gang-gang sempit kota besar tersimpan kerumunan masyarakat miskin. Mereka bertempat tinggal di bawah atap-atap seng dan genting yang sangat sederhana bahkan memprihatinkan, dindingnya terbuat dari kayu, bukan gedung dari beton seperti Istana Negara, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Selain itu, di mal, super market, pelabuhan, terminal bus, dan stasisun kereta api kerap ditemukan masyarakat miskin yang meminta-minta. Mereka mengorbankan rasa malu dengan meminta-minta, lantaran sulitnya mendapat pekerjaan layak sebagai warga negara Indonesia. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang rela meninggalkan sanak keluarga di rumah bekerja ke luar negeri untuk mendapat pekerjaan layak, sebab mencari pekerjaan di negaranya sendiri sulit sekali.

Itu hanya sedikit gambaran gurita kemiskinan di kota-kota besar dan tempat umum. Jika masuk lebih ke pedalaman Indonesia lagi, seperti yang terjadi di kampung-kampung, sungguh kemiskinan benar-benar menggurita. Mereka kesulitan sekali mendapat pekerjaan layak untuk bisa bertahan hidup. Bahkan dari cerita warga di kampung-kampung pedalaman, ada sebagian tetangga yang anaknya putus sekolah lantaran tidak punya biaya.

Pendidikan adalah kunci utama untuk membebaskan bangsa Indonesia dari gurita kemiskinan. Jika pendidikannya saja sangat tidak layak, lalu kapan bangsa ini bisa maju bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Maka, keputusan MK menghapus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) sangat tepat sekali sebagai tindakan untuk meratakan mutu pendidikan nasional. Agar masyarakat secara umum bisa mendapat pendidikan layak. Selama ini hanya anak-anak orang berduit yang berkesempatan menikmati RSBI. Sedangkan masyarakat miskin untuk biaya makan saja harus pontang-panting mendapatkannya, apalagi untuk biaya pendidikan sekelas RSBI.

Sampai kapan pun bangsa Indonesia akan terus tertinggal dari bangsa-bangsa maju, jika pemerataan mutu pendidikan tidak segera dilakukan. Pendidikan harus menjadi fokus utama pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan. Kemendikbud sejak tahun 2010 sudah mengeluarkan beasiswa Bidik Misi bagi siswa miskin yang berprestasi, sehingga mereka bisa kuliah di kampus-kampus mahal kota-kota besar.

Tentu kebijakan ini bagus sekali, hanya saja yang perlu ditingkatkan Kemendikbud adalah evaluasi tepat tidaknya penerima beasiswa Bidik Misi. Sebab masih saja ada sebagian penerima yang sebenarnya tidak layak, lantaran memiliki kemampuan ekonomi yang mapan. Karena itu, pengawasan yang intensif dari pihak Kemendikbud harus ditingkatkan agar kebijakannya benar-benar dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Jika pendidikan bangsa Indonesia sudah bagus, dengan cepat Indonesia akan maju dan sejahterah. Demokrasi kita akan semakin mapan diikuti politik yang semakin bagus. Peran negara benar-benar hadir dalam masyarakat. Kesejahteraan terjamin. Keamanan sangat kondusif. Pemerintah tidak lagi korup. Hukum benar-benar adil. Dan, cita-cita kemerdekaan bisa segera terwujud, yakni Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Sangat sulit untuk untuk memberantas kemiskinan secara utuh, tetapi setidaknya mengurangi angka kemiskinan. Berbagai cara yang di lakukan oleh pemerintah namun pada kenyataanya kemiskinan masih sangat memperhatikan. Pengembangan dan perbaikan daerah terpencil Pemberian Bantuan Langsung tunai (BLT) yang di tujuhan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan pendidikan gratis sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun pada kenyataanya berjalan berjalan dengan maksimal.

Perbaikan dan pengembangan kampung misalnya, dana yang seharusnya di gunakan, tetapi justru di selewengkan oleh oknum dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi. Begitupun dengan program BLT dan pengobatan gratis masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dan

penyimpangan misalnya masyarakat yang seharusnya berhak menerima justru tidak mendapatkan haknya, begitu pun sebaliknya. serta program pendidikan gratis sampai jenjang SMP, pada kenyataannya tetap ada berbagai macam pungutan-pungutan yang memberatkan para orang tua.

Upaya yang dapat ditempuh untuk menanggulangi kemiskinan agar mutu pendidikan meningkat antara lain:

1. Menciptakan banyak lapangan pekerjaan

Menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan sumberdaya yang ada di daerah tersebut, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

2. Menyamaratakan pendidikan terutama di daerah-daerah yang terpencil.

Menyamaratakan pendidikan termasuk di daerah terpencil yang sulit untuk di jangkau agar mereka juga dapat merasakan pendidikan sehingga meskipun bermukim di daerah terpencil tetapi tetap memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik.

3. Memberikan modal usaha bagi masyarakat yang kurang mampu

Salah satu faktor kemiskinan adalah karena tidak adanya pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang di miliki. untuk mengatasinya perlu adanya peminjaman modal bagi masyarakat yang tidak mampu agar mereka memiliki penghasilan, sehingga sebagian dari penghasilannya dapat disisihkan untuk membiayai pendidikan. Bahkan juga dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan.

4. Memberantas korupsi

Masalah korupsi di Indonesia memang sangat memperhatikan, bahkan menurut pemberitaan diberbagai media, Indonesia adalah salah satu Negara yang terkorup. Tidak terhitung uang yang di ambil oleh para koruptor demi kebutuhan dan kepentingan pribadi, yang seharusnya uang tersebut di gunakan untuk menanggulangi kemiskinan dan untuk memperbaiki kualitas pendidikan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia. *Pertama*, Tingkat pendidikan masyarakat mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Masyarakat yang berpendidikan tinggi akan mempunyai keterampilan dan keahlian,

sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan produktivitas akan meningkatkan *output* perusahaan, peningkatan upah pekerja, peningkatan daya beli masyarakat sehingga akan mengurangi kemiskinan. *Kedua*, kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan penanganan lintas sektoral, lintas profesional dan lintas lembaga.

Kemiskinan adalah persoalan semua orang dan semua pihak. Ia akan tetap ada dimana dan kapan saja. Semua pihak bertanggung jawab untuk menghapuskannya, minimal menguranginya. Adalah tugas utama negara untuk menghapuskan kemiskinan dan meratakan distribusi kekayaan, sehingga tercapailah keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Agama Islam adalah agama yang mengatur segenap aspek kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat, termasuk tentang kemiskinan. Karena itulah Islam diturunkan guna merealisasikan kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia, serta menghapuskan kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya saran saya agar pemerintah dan seluruh masyarakat di Indonesia mau bekerja sama untuk ikut berperan serta dalam meningkatkan strata pendidikan bagi masyarakat. Meningkatkan kualitas pendidikan dan upaya meminimalkan jumlah kemiskinan agar negara Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan baik dari krisis ekonomi maupun kemiskinan yang semakin meningkat tiap tahunnya, agar negara kita bisa berkembang dan maju serta mensejajarkan dengan negara maju yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Andersson, Engvall and Kokko., "Determinants of Poverty in Lao PDR", *Stockholm School of Asian Studies*, Stockholm School of Economics, 2005.
- Dornbusch R, Fischer S, Startz R., *Macroeconomics 8th Edition*, New York: McGraw-Hill, 2004.
- Granger, C. W. J, "Investigating Causal Relations By Econometric Models And Cross-Spectral Methods", *Econometrica*, 1969,
- Gujarati DN, *Basic Econometrics 4th Edition*, New York: McGraw Hill, 2004.
- Gundlach, E.; de Pablo, J.N.; Weisert, N, *Education Is Good For The Poor*, World Institute for Development Economics Research, 2001.

- Jhingan, M.L, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- , *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kakwani, N. S. Khandker and H.H. Son, *Pro-Poor Growth: Concepts and Measurement with Country Case Studies*. United Nations Development Programme International Poverty Centre. Vol 1. Brasil, 2004.
- Lucas, R.E.B., *Handbook of Family and Economics Internal Migration in Developing Countries*, ed. M. R. Rosenzweig and Stark. Boston. Elseviere-Science Press, 1997, 721-78.
- NAPS, Unemployment and Poverty, *Poverty Briefing No 7 Unemployment and Poverty*, Poverty Agency, 1999.
- Rahman, R.I., Access to Education and Employment: Implications for Poverty. *PRCPB Working Paper No. 14*. Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS). Dhaka, Bangladesh, 2006.
- Siregar, H dan D. Wahyuniarti, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*, Bogor. MB-IPB, 2007.
- Suparno, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan: Studi Pro Por Growth Policy di Indonesia*, Bogor: IE-IPB, 2010.
- Tambunan, T., *Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia. Beberapa Isu Penting*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- , T., *Perekonomian Indonesia sejak Orde Lama hingga Pasca Krisis*, Jakarta, Pustaka Quantum, 2006.
- Todaro, M. P and S. C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- World Bank, *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta: The World Bank Office, 2005.
- , *World Development Indicators*, Washington: World Bank, 2007.
- , *Meningkatkan Pelayanan Umum bagi Rakyat Miskin. Konferensi Nasional Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian Tujuan Millenium*, Jakarta: The World Bank, 2004.
- , *Mewujudkan Pelayanan Umum bagi Masyarakat Miskin*, Jakarta: The World Bank, 2004.